

penyelesaian masalah tersebut, diantaranya melalui pemberian Nota Protes dan pemanggilan Dubes Tiongkok.¹⁶⁰

Menurut peneliti apabila Indonesia melakukan diplomasi maritim koersif kepada Tiongkok, Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan untuk mendukung terwujudnya Visi Poros Maritim dunia Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai negara investasi. Diplomasi Maritim Koersif adalah kebalikan dari Diplomasi Maritim Kooperatif. Jika terjadi konflik rumit antara kedua negara yang mengakibatkan pihak militer harus turun maka upaya Diplomasi Maritim Kooperatif yang ditelah diupayakan oleh pemerintah Indonesia akan sia-sia.

Tabel 4. 3 Upaya Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Tiongkok untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

No	Indikator	Bentuk Upaya yang Dilakukan Indonesia
1	Diplomasi maritim kooperatif	Diplomasi maritim kooperatif memiliki keterlibatan yang suka rela, yang mana kegiatan ini melibatkan berbagai aset maritim dan personel maritim yang memiliki tujuan yang sama. ¹⁶¹ Keterlibatan ini meliputi pertukaran personel, program pendidikan, latihan keamanan maritim bersama, dan lainnya yang bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama
	a. <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief</i>	Bantuan kemanusiaan dan misi bantuan bencana memiliki efek diplomatik karena hal ini menunjukkan ketersediaan angkatan laut untuk

¹⁶⁰Ela Riska, (2017):41

		<p>mendukung negara lain serta menekankan peran selain perang yang dapat digunakan militer, Dalam upaya diplomasi Indonesia tidak pernah menggunakan faktor ini sebagai upaya diplomasi maritim terhadap Tiongkok. Malah sebaliknya Tiongkok yang pernah memberikan bantuan bencana semasa pemerintahan Jokowi ini. Pada tahun 2018 pada saat terjadi gempa dan tsunami di palu Tiongkok melakukan aksi cepat dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu penanggulangan bencana tersebut</p>
	<p>b. <i>Goodwill Visit</i></p>	<p>a. Jokowi melakukan kunjungan bilateral kepada Tiongkok untuk membahas bergabungnya Indonesia sebagai anggota Asian Infrastruktural Investment Bank (AIIB) dan membahas agenda maritim Indonesia serta gagasan jalur sutra yang dicanangkan oleh Tiongkok</p> <p>b. tahun 2015 presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk menghadiri 65 tahun penggalangan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia, sekaligus genap 10 tahun penjalinan hubungan kemitraan strategis dan 60 tahun pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung</p> <p>c. Pertemuan selanjutnya Presiden Jokowi beserta beberapa menteri mengunjungi presiden Xi Jinping pada jumat 2 September 2016. pembahasan mengenai infrastruk dan manufaktur, peningkatan</p>

	<p><i>c. Training and Joint Exercise</i></p>	<p>BAKAMLA menyelenggarakan kegiatan yang berkategori sebagai cooperative maritime diplomacy melalui pelaksanaan Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM) dan kunjungan kerja BAKAMLA sebagai representatif coast guard Indonesia ke Beijing, China pada November 2016.</p>
		<p>investasi, dan pariwisata</p> <p>d. Tanggal 4-5 September 2016 melakukan Kunjungan ke Tiongkok dalam rangka menghadiri KTT G20 di Tiongkok. Tiongkok hanya mempertegas posisinya sebagai negara penggerak pembangunan di wilayah Asia dengan strategi One Belt, One Road dan mengembangkan infrastruktur di wilayah Asia dengan Asian Infrastructure Investment Bank</p> <p>e. Selanjutnya presiden Jokowi menghadiri pembukaan KTT Belt and Road Forum for International Cooperation di Tiongkok dan melakukan pertemuan bilateral antara kedua negara. Pada pertemuan ini Indonesia menawarkan Investasi di wilayah maritim untuk perkembangan pembangunan pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan investasi yang ditawarkan berupa pengembangan Pelabuhan Bitung, termasuk pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara untuk menunjang Pelabuhan Bitung</p>

	d. <i>Joint Maritime Security Operations.</i>	Belum terlaksana
2	Diplomasi Persuasif	Melakukan <i>showing the Flag</i> sebagai bentuk eksistensi negara di wilayah perairan Indonesia, serta manfaat dari usaha ini bisa melindungi hasil kekayaan laut Indonesia dari aktifitas <i>illegal fishing</i> . Dengan banyaknya kasus penangkapan kapal asing yang melakukan <i>illegal fishing</i> di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membuktikan metode <i>showing the flag</i> harus dilakukan pemerintah Indonesia. Terlebih lagi salahsatu kapal ikan asing yang sering masuk ke wilayah Indonesia adalah kapal dari Tiongkok
3	Diplomasi koersif	Dalam penegakan keamanan wilayah di sektor laut Indonesia, Pemerintah Indonesia pernah menggunakan instrument militer terhadap kapal-kapal berbendera Tiongkok. Penggunaan instrument tersebut berupa tindakan penghaluan, peringatan, pengejaran, dan penangkapan. Namun Upaya pemerintah Indonesia ini hanyalah semata-mata berfungsi untuk mengamankan wilayah laut Indonesia serta menjaga sumber daya alam yang ada di wilayah laut Indonesia. Kegiatan ini hanya bersifat penjagaan dengan menggunakan instrument militer.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor maritim memiliki potensi besar dan menjadi bagian penting dalam kedaulatan Indonesia. Sektor maritim sangat potensial terhadap pertumbuhan ekonomi negara di mana hasil perikanannya menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki banyak cadangan energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu cadangan minyak bumi dan cadangan gas alam. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga tinggal di wilayah perairan, sehingga potensi akan sumber daya manusia juga besar dan dapat bermanfaat bagi perkembangan maritim Indonesia.

Dengan adanya potensi maritim Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan visi Poros Maritim Dunia sebagai target percepatan pembangunan dan keamanan maritim, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor maritim. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan maritim terbesar di dunia, Tiongkok dianggap potensial untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia. Diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok dimulai ketika Indonesia menandatangani kesepakatan bergabung dalam *Maritime Silk Road* Tiongkok pada tahun 2015. Konektivitas maritim yang dibangun Tiongkok melalui *Maritime Silk Road* sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia oleh Indonesia.

Adapun upaya Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Tiongkok yaitu, Diplomasi Maritim Kooperatif berupa kunjungan kenegaraan. Presiden Jokowi melakukan kunjungan bilateral kepada Tiongkok untuk membahas bergabungnya Indonesia sebagai anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan membahas agenda maritim Indonesia serta gagasan jalur sutra yang dicanangkan oleh Tiongkok. Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk menghadiri 65 tahun penggalangan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia. Presiden Jokowi beserta beberapa menteri mengunjungi presiden Xi Jinping pada 2016 untuk membahas mengenai infrastruktur dan manufaktur, peningkatan investasi, dan pariwisata. Kunjungan ke Tiongkok dalam rangka menghadiri KTT G20 di Tiongkok, dan Presiden Jokowi menghadiri pembukaan KTT *Belt and Road Forum for International Cooperation* di Tiongkok dan melakukan pertemuan bilateral antara kedua negara.

Indonesia dan Tiongkok juga mengadakan *Training and Joint Exercise*, BAKAMLA menyelenggarakan kegiatan yang berkategori sebagai *Cooperative Maritime Diplomacy* melalui pelaksanaan *Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting* (HACGAM) dan kunjungan kerja BAKAMLA sebagai *representatif coast guard* Indonesia ke Beijing, Tiongkok pada November 2016.

Upaya Indonesia dalam menjalankan Diplomasi Maritim Kooperatif kepada Tiongkok terkait Visi Poros Maritim Dunia Indonesia bisa dikatakan berhasil dalam mencapai kesepakatan untuk perkembangan pembangunan dan infrastruktur. Dengan adanya kegiatan Diplomasi Kooperatif ini akan meningkatkan rasa kepercayaan Tiongkok dan Tiongkok tidak ragu untuk berinvestasi untuk

perkembangan pelabuhan dan tol laut untuk memperkuat Visi Poros Maritim Indonesia.

Dalam diplomasi Maritim Persuasif Indonesia melakukan *showing the Flag* sebagai bentuk eksistensi negara di wilayah perairan Indonesia, serta manfaat dari usaha ini bisa melindungi hasil kekayaan laut Indonesia dari aktifitas *illegal fishing*. Terlebih lagi salahsatu kapal ikan asing yang sering masuk ke wilayah Indonesia adalah kapal dari Tiongkok. Diplomasi maritim persuasif tidak berdampak langsung kepada Negara Indonesia, namun sebagai Negara Maritim penandaan wilayah dengan kapal patrol ini bisa melindungi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia.

Dan dalam Diplomasi Maritim Koersif Pemerintah Indonesia pernah menggunakan instrument militer terhadap kapal-kapal berbendera Tiongkok. Penggunaan instrument tersebut berupa tindakan penghaluan, peringatan, pengejaran, dan penangkapan. Namun Upaya pemerintah Indonesia ini hanyalah semata-mata berfungsi untuk mengamankan wilayah laut Indonesia serta menjaga sumber daya alam yang ada di wilayah laut Indonesia.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap penelitian ini bisa memberi gambaran upaya Diplomasi Maritim suatu negara dengan negara lain untuk mewujudkan kepentingan negara tersebut. Diharapkan Indonesia dengan Tiongkok mempertahankan kerjasama ini untuk kedepannya.

